

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan mengenai evaluasi penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintahan pusat dengan studi kasus pada laporan keuangan tahun anggaran 2015 di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian akan memberikan saran untuk perbaikan yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengatasi kendala dan permasalahan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Pusat dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual masih akan terus mengalami perubahan dan perbaikan, baik dari segi peraturan maupun dari segi pengembangan sistem aplikasi terintegrasi. Mengingat penerapan basis akuntansi akrual di Indonesia masih pada tahap awal, dimana tahun 2015 adalah penerapan pertama kalinya basis akrual diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Kementerian Keuangan telah menerapkan aplikasi SPAN untuk Perbendaharaan Umum Negara dan masih menggunakan SAIBA untuk aplikasi akuntansi di instansi sebagai pengganti sementara aplikasi SAKTI yang belum dapat dilaksanakan karena masih pada tahap pengembangan.

Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh untuk tahun 2015 sudah sangat baik sesuai dengan instrumen penelitian yang memperoleh *scor* nilai 82,78% dengan kriteria sangat baik. Namun masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Pusat. Kekurangan yang terdapat dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh adalah pada:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan

Tidak adanya personil yang bertugas sebagai tim verifikasi atau seorang verifikator pada UAKPB. Hal ini menyulitkan dalam proses pengelolaan BMN, sehingga mengakibatkan keterandalan dari laporan BMN berkurang.

2. Kebijakan Akuntansi

Tidak dicantumkannya kebijakan akuntansi tentang Kas dan Setara Kas serta kebijakan akuntansi tentang persediaan, padahal pada neraca tersaji akun tersebut. Hal ini disebabkan karena ketidakteIitian dari petugas akuntansi dalam menyajikan Laporan Keuangan dalam menyadur ilustrasi yang ada pada PMK Nomor 177 Tahun 2015.

3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Petugas SAI sudah melakukan proses penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dengan sangat baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa hal yaitu tidak melakukan verifikasi dan analisis terhadap dokumen sumber, keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Keuangan ke UAPPA-W baik Laporan Triwulanan, Semester I atau pun

Tahunan. Hal ini terjadi karena dalam pembuatan Laporan Keuangan satker harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Eselon I, setelah selesai rekonsiliasi dengan Eselon I barulah Laporan Keuangan disampaikan ke unit lain yang terkait, termasuk ke UAPPA-W.

#### 4. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan

Adanya tim SPI di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh belum melaksanakan reviu sesuai dengan yang diamanatkan dalam PMK Nomor 255 Tahun 2013 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Reviu yang dilakukan oleh tim SPI baru sebatas pada reviu Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan saja yang pelaksanaan reviu tersebut pun tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh PMK 255 tahun 2015, tapi hanya dilakukan pada satu atau dua hari setelah Laporan Keuangan selesai dibuat.

#### 6.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintahan Pusat pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dapat diberikan saran demi mengatasi kekurangan yang masih terjadi dan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar dilakukan penetapan tim verifikasi atau seorang verifikator dalam UAKPB yang berlatar belakang akuntansi dan menguasai peraturan tentang Barang Milik Negara untuk melakukan proses verifikasi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara agar proses pengelolaannya lebih baik dan proses pembuatan Laporan Barang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat diandalkan.
2. Disarankan untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dari petugas SAI mengenai Akuntansi Pemerintahan Pusat sehingga dapat lebih teliti dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pelaporan, mengingat peraturan dan pengembangan aplikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan pusat tetap terus berkembang dan berubah-ubah dari tahun ke tahun terutama dalam usaha pemerintah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL.
3. Agar pimpinan dan atau jajaran terkait memberikan sosialisasi mengenai kebijakan penerapan SAP Berbasis AkruaL dilingkungan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sehingga seluruh unit dan bagian yang terkait dengan penerapan ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan yang handal.
4. Disarankan bagi pimpinan untuk lebih meningkatkan kinerja dari SPI khususnya untuk bagian keuangan untuk menempatkan jabatan fungsional auditor dala keanggotaan SPI dan memberikan otoritas khusus bagi SPI untuk bisa melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan mencantumkan item SPI pada bagan struktur organisasi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.